

KAJIAN LITERATUR KONSEP PEMBANGUNAN INKLUSIF DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Umar Ramli¹, Fitriany Pattisahusiwa², Rahma Rahakbauw³, Nuraini Kilwouw⁴, Arman Keliwar⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: oemar.sq@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.33506/pjs.v3i1.4735>

Abstract

This study aims to explore the concept of inclusive development in a multicultural society, which is a major challenge in creating social welfare amidst cultural, ethnic, and religious differences. The main problem faced is how to ensure that all groups in society, including the marginalized, can enjoy the results of development fairly and evenly. This study uses a qualitative method with a literature review approach, utilizing secondary sources from scientific journals, books, websites and other sources that can be utilized for the problems studied that lead to the concept of inclusive development in a multicultural society. The results of the study show that inclusive development does not only focus on economic aspects, but also on fulfilling social and cultural rights, strengthening mutual respect between groups, and providing equal access to education, health, and employment opportunities. In addition, community involvement in the development decision-making process is key to creating sustainable, equitable development. In conclusion, inclusive development in a multicultural society requires an approach based on respect for diversity, collaboration between groups, and policies that encourage active participation from all levels of society without exception. This is important to create a just, prosperous, and harmonious society.

Keywords: Development Concept; Inclusive; Multicultural Society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural, yang menjadi tantangan utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial di tengah perbedaan budaya, etnis, dan agama. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur, dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder dari jurnal ilmiah, buku, web dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan terhadap permasalahan yang diteliti yang mengarah pada konsep pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan hak sosial dan budaya, penguatan rasa saling menghormati antar kelompok, serta penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan menjadi kunci dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan yang merata. Kesimpulannya, pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural memerlukan pendekatan yang berbasis pada penghargaan terhadap keragaman, kolaborasi antar kelompok, serta kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Kata Kunci: Konsep Pembangunan; Inklusif; Masyarakat Multikultural

PENDAHULUAN

Pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural merujuk pada proses pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, agama, maupun budaya, dapat

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan merasakan manfaatnya secara adil Sachs, Jeffrey (2015). Konsep ini sangat relevan di negara-negara dengan keragaman budaya yang tinggi, seperti Indonesia, yang memiliki berbagai kelompok etnis, bahasa, dan agama.

Dalam konteks ini, pembangunan inklusif berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang merata, mengurangi ketimpangan, dan menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat yang berbeda Stiglitz, Joseph E. (2012).

Masalah utama yang dihadapi dalam implementasi pembangunan inklusif di masyarakat multikultural adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat. Beberapa kelompok sering kali terpinggirkan dari proses pembangunan karena akses mereka yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang Hickey, S., & Du Toit, A. (2013). Misalnya, kelompok minoritas etnis atau agama tertentu sering kali menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang setara dengan kelompok mayoritas Banks, J. A. (2015). Ketidaksetaraan ini memperburuk ketegangan sosial yang sudah ada, memperparah jurang pemisah antar kelompok, dan dapat memicu konflik.

Selain itu, integrasi sosial menjadi tantangan besar dalam masyarakat multikultural. Meskipun Indonesia dikenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, kenyataannya banyak ketegangan sosial yang muncul akibat ketidakmampuan masyarakat untuk menerima perbedaan. Konflik antar kelompok etnis atau agama sering kali dipicu oleh prasangka, stereotip, dan diskriminasi

yang berlangsung lama. Oleh karena itu, pembangunan inklusif harus mencakup upaya untuk mengurangi prasangka dan menciptakan ruang bagi dialog antar budaya.

Tujuan utama dari pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural adalah menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua individu, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, dapat menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi dan sosial World Bank, (2025). Pembangunan inklusif berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Ini melibatkan penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya, serta mengakomodasi keberagaman budaya dan agama dalam perencanaan pembangunan.

Dalam praktiknya, pembangunan inklusif dapat diwujudkan dengan merancang kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menghargai dan melestarikan budaya serta identitas setiap kelompok masyarakat Hastuti, R. et al. (2020). Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok.

Namun, implementasi pembangunan inklusif di masyarakat multikultural tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana merancang kebijakan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelompok-kelompok yang lebih rentan atau terpinggirkan Fraser, N. (2009). Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, penting untuk melakukan pendekatan berbasis data yang menggali isu-isu keberagaman secara lebih terperinci, agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar efektif dalam mengurangi ketimpangan.

Salah satu contoh penerapan pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural adalah kebijakan desentralisasi yang memberi kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hardiansah, E. C. (2015) Dalam kerangka desentralisasi ini, pemerintah daerah dapat lebih memahami dinamika sosial dan budaya di wilayahnya, serta merancang program yang inklusif dan relevan bagi masyarakat setempat Kuswandi (2011). Selain itu, kebijakan ini memungkinkan partisipasi aktif dari

masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil lebih diterima dan mendukung terciptanya keharmonisan sosial.

Penting untuk menekankan bahwa pembangunan inklusif bukan hanya tentang memastikan akses yang setara terhadap sumber daya, tetapi juga tentang penghargaan terhadap keberagaman budaya Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Salah satu contoh yang dapat diambil adalah dalam pendidikan, di mana kurikulum pendidikan harus mencakup nilai-nilai keberagaman dan toleransi, serta memperkenalkan siswa kepada berbagai budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Hal ini akan membantu generasi muda untuk tumbuh dengan pemahaman yang lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan.

Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam menciptakan wacana yang inklusif dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Media dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membangun komunikasi antar budaya, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, dan memperkenalkan kontribusi positif yang diberikan oleh kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat Khan, A. W. (2008). Namun, media juga harus berhati-hati agar tidak memperburuk stereotip atau prasangka yang ada.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman, pembangunan inklusif

menjadi semakin penting untuk menjaga perdamaian sosial dan memperkuat solidaritas antar kelompok. Negara ini memerlukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial dan budaya yang berbeda, serta lebih memperhatikan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan Fraser, N. (2009).

Pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural juga mengharuskan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, maupun lembaga internasional. Kolaborasi antara berbagai pihak ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian literatur ini mengutamakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang membahas konsep pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural Booth et al., (2021). Literatur yang digunakan difokuskan pada sumber-sumber yang menawarkan perspektif teoritis dan empiris mengenai bagaimana pembangunan inklusif dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya, etnis, dan agama. Sumber utama dari buku dan jurnal ilmiah digunakan untuk memahami definisi dan

prinsip dasar pembangunan inklusif serta keterkaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat multikultural.

Dalam hal ini, literatur mengenai teori-teori sosial dan pembangunan yang berfokus pada keadilan sosial, pemerataan akses, dan pengakuan terhadap keberagaman menjadi dasar penting untuk menganalisis topik ini. Artikel dari jurnal internasional yang membahas studi kasus di berbagai negara multikultural juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang implementasi nyata dari konsep inklusi sosial dalam praktek pembangunan. Selain itu, artikel dari web dan laporan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan pembangunan inklusif di negara-negara dengan masyarakat multikultural turut memperkaya pemahaman dalam kajian ini. Dengan cara ini, metode yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep dan penerapan pembangunan inklusif, serta tantangan yang dihadapi dalam masyarakat multikultural. Literatur yang dikaji memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dan program pembangunan dapat mengakomodasi keberagaman untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif merupakan suatu konsep yang berfokus pada memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,

mendapatkan akses yang sama terhadap peluang dan manfaat pembangunan Cypher, J. M. (2014). Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata Nussbaum, M. C. (2011). Dalam konteks pembangunan inklusif, kesetaraan akses menjadi hal yang fundamental, di mana setiap individu, kelompok, atau komunitas terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya dapat menikmati hasil-hasil dari proses pembangunan yang berlangsung.

Pembangunan inklusif menekankan pada pemerataan hasil pembangunan, baik dalam hal distribusi kekayaan, kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun akses terhadap pekerjaan yang layak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketimpangan sosial yang dapat merugikan kelompok marginal dan memperburuk kesenjangan antara kelompok yang lebih beruntung dengan yang kurang beruntung Kabeer, N. (2010).

Lebih dari itu, pembangunan inklusif juga bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan sosial. Dalam masyarakat yang inklusif, setiap individu dihargai dan diakui hak-haknya, baik dalam konteks politik maupun sosial Konsep ini melibatkan

pemberdayaan kelompok-kelompok yang selama ini mungkin terabaikan atau terdiskriminasi, seperti kaum perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, atau masyarakat adat Sen, G. (2019). Pemberdayaan ini penting untuk menciptakan sebuah masyarakat yang bukan hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga tumbuh dalam keberagaman dan rasa saling menghormati.

Pembangunan inklusif juga berhubungan erat dengan penciptaan peluang bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkat keputusan pembangunan, baik itu melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, menjadi elemen kunci dari pembangunan inklusif Nasional, B. P. P. (2020) Hal ini memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya sebagian kecil kelompok atau individu yang memiliki akses lebih.

Dalam prakteknya, pembangunan inklusif mengharuskan adanya kebijakan dan program yang mempertimbangkan keanekaragaman dan kesetaraan. Ini tidak berarti hanya meratakan semua aspek kehidupan, tetapi lebih kepada pengakuan atas keberagaman dan pemenuhan kebutuhan setiap kelompok masyarakat. Dalam hal ini,

pemerintah memegang peranan penting dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendorong inklusi sosial dan ekonomi, serta menjamin bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang Nasional, B. P. P. (2014).

Namun, penerapan pembangunan inklusif bukanlah tanpa tantangan. Ketimpangan yang sudah lama ada dalam masyarakat sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, penting bagi pembangunan inklusif untuk juga mencakup pendekatan-pendekatan yang dapat mengatasi hambatan struktural dan budaya yang ada. Misalnya, diskriminasi rasial, gender, atau sosial-ekonomi, yang secara langsung atau tidak langsung memperburuk ketimpangan dan menghalangi beberapa kelompok untuk mengakses peluang yang ada. Oleh karena itu, pembangunan inklusif menuntut adanya komitmen jangka panjang dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk secara aktif memerangi ketidaksetaraan dan diskriminasi Gasper, D. (2022).

Secara keseluruhan, pembangunan inklusif bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan penuh kesempatan bagi semua. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, pembangunan ini berusaha menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pembangunan bukan hanya soal kemajuan

ekonomi semata, tetapi lebih pada upaya menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat bagi setiap individu dalam masyarakat, tanpa memandang latar belakang mereka Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2020).

Ciri-ciri Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural merujuk pada sebuah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah atau negara. Keragaman ini menciptakan suatu dinamika sosial yang kompleks, di mana masing-masing kelompok membawa nilai, tradisi, dan kepercayaan yang berbeda-beda Banks, J. A., & Diem, N. (2008). Masyarakat multikultural bukan hanya terdiri dari perbedaan yang tampak jelas, seperti ras atau agama, tetapi juga menyangkut berbagai dimensi identitas yang lebih mendalam, seperti kelas sosial, status ekonomi, dan orientasi politik.

Pada dasarnya, masyarakat multikultural memiliki karakteristik utama berupa keberagaman yang meresap dalam setiap aspek kehidupan. Masing-masing kelompok dalam masyarakat ini memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya mereka, berinteraksi dengan kelompok lain, dan turut berkontribusi pada kehidupan sosial-politik yang lebih besar. Keragaman budaya ini, meskipun terkadang dapat menimbulkan ketegangan, juga membawa potensi besar

untuk menciptakan kekayaan sosial, kreativitas, dan inovasi.

Namun, masyarakat multikultural tidak selalu berjalan mulus. Keberagaman ini sering kali memunculkan tantangan dalam hal integrasi sosial, terutama ketika ada ketimpangan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya. Terkadang, kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau kurang dihargai dalam proses sosial atau politik yang dominan. Dalam banyak kasus, ketegangan antar kelompok etnis atau agama dapat berkembang menjadi konflik terbuka, terutama ketika ada perbedaan tajam dalam identitas dan persepsi kelompok tersebut Bertrand, J. (2004).

Keragaman budaya dalam masyarakat multikultural juga berperan dalam membentuk pola interaksi sosial yang lebih kompleks. Misalnya, cara orang berkomunikasi, berbagi ruang publik, atau bahkan berinteraksi dalam lingkungan kerja dapat sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan dalam bahasa, kebiasaan, dan cara pandang terhadap nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, atau kekuasaan dapat mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam kehidupan sehari-hari Koentjaraningrat, K. (2009).

Tantangan lainnya yang sering dihadapi oleh masyarakat multikultural adalah kesenjangan sosial yang bisa terjadi antar kelompok yang lebih dominan dan yang

terpinggirkan. Beberapa kelompok, misalnya kelompok minoritas etnis atau agama, mungkin menghadapi diskriminasi atau stereotip yang mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial Ydo, Y. (2020). Diskriminasi ini dapat berakar dari ketakutan atau ketidakpahaman terhadap perbedaan, yang mengarah pada ketegangan sosial dan pemisahan antar kelompok dalam masyarakat.

Namun, masyarakat multikultural juga membawa potensi besar untuk saling memperkaya. Berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda dapat saling belajar satu sama lain, memperkenalkan tradisi dan praktik baru, serta menciptakan ruang untuk dialog antar budaya. Konsep seperti toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan integrasi sosial sangat penting dalam masyarakat multikultural. Masyarakat yang dapat mengelola keragaman ini dengan bijaksana berpotensi menciptakan suasana yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diberi kesempatan yang setara Modood, T. (2013).

Di tengah keragaman ini, penting untuk memupuk rasa saling menghormati dan menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk berbicara dan didengarkan. Ini adalah bagian dari proses yang lebih besar untuk membangun masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Integrasi yang harmonis dalam masyarakat multikultural tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada usaha kolektif seluruh anggota masyarakat untuk merayakan perbedaan dan bekerja bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif Banks, J. A. (2015).

Hubungan Antara Pembangunan Inklusif dan Masyarakat Multikultural

Pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural memiliki hubungan yang erat karena keduanya berkaitan dengan upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang budaya, etnis, atau agama mereka. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang dihuni oleh individu-individu dengan identitas budaya, etnis, dan agama yang beragam. Dalam konteks ini, pembangunan inklusif menjadi sangat penting karena ia berupaya untuk menjembatani kesenjangan yang ada, mengurangi ketimpangan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua kelompok masyarakat Nasional, B. P. P. (2020).

Pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural tidak hanya sekedar tentang distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil, tetapi lebih kepada upaya untuk mengakui dan menghormati keberagaman yang ada Stuart, E., & Samman, E. (2017). Di dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama, sering kali terjadi diskriminasi, ketidaksetaraan, atau

marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, pembangunan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok—baik mayoritas maupun minoritas—memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya.

Penting untuk dipahami bahwa pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural bukan hanya sekedar memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga menciptakan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan dan melestarikan identitas budayanya. Konsep inklusivitas ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, dan ini menjadi salah satu aspek utama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Pembangunan yang inklusif dalam konteks ini bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang memungkinkan setiap individu merasa dihargai dan diterima dalam masyarakat.

Namun, penerapan pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural menghadapi berbagai tantangan. Stereotip dan prasangka sering kali muncul antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik yang berkaitan dengan perbedaan etnis, agama, maupun budaya. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok yang dominan dapat mempengaruhi proses pembangunan dengan cara yang lebih menguntungkan mereka,

sementara kelompok minoritas sering kali terpinggirkan. Untuk itu, pembangunan inklusif membutuhkan kebijakan yang bersifat afirmatif—yakni kebijakan yang secara khusus bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan Kabeer, N. (2010). Dengan cara ini, pembangunan dapat lebih adil dan merata, dan tidak ada kelompok yang tertinggal atau diabaikan.

Selain itu, pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, tetapi masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan individu, juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan toleran. Kabeer, N. (2005). Program-program yang mendorong dialog antarbudaya, pengembangan kapasitas masyarakat untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta penyuluhan mengenai pentingnya keberagaman menjadi langkah-langkah yang sangat penting dalam proses ini.

Di sisi lain, pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural memerlukan penguatan sistem hukum yang dapat melindungi hak-hak individu dan kelompok minoritas. Tanpa adanya perlindungan yang jelas melalui undang-undang dan kebijakan, kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam

berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, atau akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif adalah fondasi yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif Cerra, V. (2022).

Pada akhirnya, pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural bukan hanya sekadar suatu proses ekonomi atau politik, melainkan suatu pendekatan yang lebih luas yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap keberagaman, serta komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara Alkire, S. (2002). Masyarakat multikultural yang inklusif akan mendorong terciptanya keharmonisan sosial dan keberlanjutan pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Strategi Pembangunan Inklusif di Masyarakat Multikultural

Strategi pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan yang cermat dan holistik untuk memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan manfaat pembangunan. Dalam masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, etnis, dan budaya, pembangunan inklusif tidak hanya berarti memberikan kesempatan yang setara, tetapi juga menciptakan lingkungan yang

mendukung keadilan sosial dan pengakuan terhadap keberagaman.

Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah melalui pendidikan yang berbasis pada keragaman. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap pentingnya inklusivitas dan toleransi Nieto, S. (2010). Dengan menyusun kurikulum yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah berbagai kelompok, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan mengurangi prasangka. Selain itu, sistem pendidikan harus menyediakan akses yang setara bagi semua kelompok, terutama yang berada di posisi marginal, seperti kelompok minoritas atau yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Menerapkan pendidikan inklusif yang memperhatikan berbagai kebutuhan dan latar belakang dapat mengurangi ketimpangan dalam kualitas pendidikan dan menciptakan individu yang lebih sadar akan pentingnya persatuan dalam keragaman.

Selain itu, kebijakan afirmatif merupakan strategi yang dapat memainkan peran signifikan dalam menciptakan pembangunan inklusif. Kebijakan afirmatif bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih kepada kelompok yang terpinggirkan untuk mengakses sumber daya, peluang ekonomi, atau layanan publik Vandemoortele, J. (2002). Kebijakan ini dapat berupa pembukaan lapangan kerja yang lebih luas bagi kelompok

minoritas atau penyediaan beasiswa khusus bagi anak-anak dari kelompok yang kurang mampu. Namun, dalam menerapkan kebijakan afirmatif, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru menciptakan ketegangan sosial atau ketidakpuasan di kalangan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif harus diterapkan dengan cara yang adil, transparan, dan dilandasi oleh dialog sosial yang inklusif.

Program-program yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat juga penting dalam pembangunan inklusif. Pembangunan tidak hanya bisa dicapai melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan merasa memiliki, dan ini meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut. Oleh karena itu, menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan sangatlah penting. Ini bisa berupa forum konsultasi publik, diskusi komunitas, atau pembentukan lembaga perwakilan yang memungkinkan suara dari berbagai kelompok terdengar.

Namun, untuk mewujudkan strategi-strategi tersebut secara efektif, perlu ada dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan

yang memfasilitasi pemberdayaan semua kelompok masyarakat dan menjamin akses yang setara terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan Baumann, F. (2021). Kebijakan tersebut harus mengutamakan keadilan sosial, yang berarti tidak hanya memenuhi kebutuhan mayoritas, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas yang sering kali diabaikan.

Terakhir, penting untuk menciptakan budaya yang menghargai keberagaman dan mengurangi diskriminasi dalam masyarakat. Masyarakat yang multikultural memiliki potensi besar untuk berkembang, namun hal ini hanya bisa terwujud jika semua kelompok merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong dialog antar budaya, pemahaman lintas agama, dan kerjasama antar kelompok harus menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif Parekh, B. (2001). Pembangunan semacam ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial, budaya, dan politik seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan yang sejati di tengah keragaman.

Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif

Tantangan dalam mewujudkan pembangunan inklusif di masyarakat multikultural adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Masyarakat

yang multikultural, yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan identitas, menghadapi hambatan sosial, politik, dan ekonomi yang seringkali memperburuk ketimpangan dan eksklusi. Salah satu tantangan utama adalah diskriminasi, yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Diskriminasi berbasis suku, agama, atau identitas budaya masih terjadi di banyak tempat, dan ini dapat menghalangi kelompok-kelompok ini untuk mengakses peluang yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keadilan sosial Gasper, D. (2022). Masyarakat multikultural rentan terhadap pembentukan stereotip yang memperkuat perbedaan, menciptakan prasangka, dan memperburuk hubungan antar kelompok. Stereotip ini seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakpahaman atau ketakutan terhadap yang "berbeda," yang pada gilirannya memperburuk isolasi sosial dan menghambat tercapainya inklusi.

Selain diskriminasi, ketimpangan ekonomi juga menjadi tantangan besar. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama yang terpinggirkan atau kurang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, sering kali tidak mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan Fraser, N., & Honneth, A. (2003). Mereka mungkin kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi yang ada, seperti pekerjaan yang layak,

pelatihan keterampilan, atau peluang untuk memulai usaha. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan lapisan masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dalam masyarakat multikultural, ketimpangan ekonomi ini sering kali dikaitkan dengan identitas budaya atau etnis, yang memperburuk ketidakadilan sosial.

Salah satu masalah mendalam yang harus dihadapi adalah ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Kelompok-kelompok tertentu mungkin merasa terpinggirkan atau bahkan teralienasi dari proses pembuatan kebijakan Kymlicka, W. (2007). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya representasi politik, ketidakmampuan untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada hidup mereka, atau bahkan ketidakadilan dalam sistem pemilihan umum yang tidak mencerminkan keragaman masyarakat. Ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dapat mengarah pada kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan dan konflik sosial Undp, A. (2016).

Masalah identitas juga seringkali menjadi tantangan besar dalam masyarakat multikultural. Konflik identitas ini muncul ketika kelompok-kelompok merasa bahwa identitas budaya atau agama mereka tidak diakui atau dihargai oleh kelompok lain.

Misalnya, kelompok minoritas mungkin merasa bahwa tradisi atau kepercayaan mereka tidak dihargai dalam ruang publik atau dalam kebijakan negara. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan antar kelompok, memperburuk polarisasi sosial, dan mencegah tercapainya harmoni dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang berbasis pada dialog dan pengakuan terhadap keberagaman. Pendidikan tentang keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dialog antar budaya, yang mendorong saling pengertian dan empati, dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka yang sering muncul di masyarakat multikultural EDuCatIon, C. (2010). Selain itu, penting untuk memastikan adanya kebijakan yang inklusif dan afirmatif yang memberi perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, memberikan mereka akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan politik.

Pada akhirnya, meskipun tantangan-tantangan ini besar dan kompleks, dengan pendekatan yang tepat dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, pembangunan inklusif di masyarakat multikultural dapat tercapai. Ini bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang menciptakan ruang di mana perbedaan

dihargai, diakui, dan dihormati, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Peran Kebijakan Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Pemerintah dan masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam konteks keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa yang ada di negara multikultural Triandafyllidou, A. (2013). Peran pemerintah dimulai dari pembuatan undang-undang yang mengatur hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan ini mencakup perlindungan terhadap kelompok minoritas, penyediaan layanan publik yang merata, serta pembentukan sistem yang memastikan semua warga memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada kelompok yang terpinggirkan, seperti suku atau agama tertentu yang mengalami ketidaksetaraan, menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan inklusif Fraser, N. (2009). Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dijalankan dengan tegas dan efektif

melalui pengawasan yang ketat dan pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk mendirikan lembaga yang independen untuk memastikan perlindungan hak-hak minoritas dan menyelesaikan sengketa yang berpotensi muncul dalam masyarakat yang plural.

Sementara itu, masyarakat sipil, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu, juga memainkan peran kunci dalam mendorong inklusi sosial dan pembangunan. Masyarakat sipil berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Mereka seringkali menjadi suara yang mengadvokasi hak-hak kelompok yang terpinggirkan, seperti komunitas adat, kelompok miskin, atau kelompok dengan identitas tertentu yang kurang mendapat perhatian. Organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam mendidik dan membangun kesadaran tentang pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dan nilai-nilai inklusivitas di dalam masyarakat. Melalui kampanye, pelatihan, serta diskusi publik, mereka dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan memperjuangkan perubahan yang diperlukan dalam kebijakan dan praktik sosial Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024).

Selain itu, masyarakat sipil berperan sebagai penjaga integritas dari proses pembangunan inklusif dengan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah

Chaudhry, S. (2022). Mereka dapat menyuaraikan ketimpangan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan pembangunan, serta memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok yang lebih rentan. Dengan partisipasi aktif ini, masyarakat sipil membantu menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan warga negara, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk keberagaman dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu.

Secara keseluruhan, pemerintah dan masyarakat sipil harus berkolaborasi erat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural. Kerja sama antara keduanya tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif, tetapi juga membangun rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis Negretto, G. L. (2021).

Studi Kasus dan Contoh Penerapan

Dalam pembahasan tentang konsep pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural, studi kasus menjadi bagian yang sangat penting karena memberikan gambaran nyata bagaimana teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang sering dijadikan referensi adalah kebijakan inklusif yang diterapkan di beberapa negara yang dikenal dengan masyarakat

multikulturalnya, seperti Kanada, Afrika Selatan, dan India.

Kanada, misalnya, dikenal sebagai negara yang mempromosikan kebijakan multikulturalisme sejak tahun 1971. Pemerintah Kanada mengadopsi kebijakan ini dengan tujuan untuk merayakan keberagaman budaya dalam masyarakat mereka, memastikan bahwa setiap kelompok etnis memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Negara ini tidak hanya menyediakan dukungan bagi kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas budaya mereka, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai inklusif dalam struktur pemerintahan dan kebijakan sosial. Dalam konteks pembangunan inklusif, Kanada menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan, yang dalam banyak hal telah meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi ketimpangan antar kelompok Fortier, A. M. (2021).

Afrika Selatan, setelah berakhirnya apartheid, juga menjadi contoh penting dalam penerapan pembangunan inklusif di masyarakat yang sangat multikultural. Negara ini, dengan beragam suku dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Setelah tahun 1994, pemerintah Afrika Selatan mengimplementasikan kebijakan yang dikenal dengan sebutan "Rekonsiliasi Nasional," yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial-

ekonomi yang masih kuat antara kelompok kulit putih dan kulit hitam. Program-program seperti perumahan terjangkau, akses pendidikan yang lebih inklusif, dan kebijakan affirmative action (tindakan afirmatif) untuk memperbaiki keseimbangan rasial di tempat kerja, berfokus pada integrasi sosial yang adil Watt, S. K. (2023). Dalam hal ini, pembangunan inklusif tidak hanya mengutamakan distribusi ekonomi, tetapi juga menghargai dan memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun masa depan negara yang lebih stabil dan harmonis.

India, dengan keragamannya yang sangat besar dalam hal agama, bahasa, dan budaya, juga menunjukkan penerapan pembangunan inklusif meskipun tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan bagi kelompok marginal, seperti Dalit (yang dikenal sebagai kelompok kasta terendah), serta masyarakat adat. Selain itu, program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan minoritas agama, seperti Muslim, telah menjadi bagian dari upaya menciptakan inklusi sosial dan ekonomi. Meski demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap ada, terutama terkait dengan ketidaksetaraan yang masih kuat di level akar rumput, yang menunjukkan bahwa pembangunan inklusif memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan.

Studi kasus dari negara-negara ini memperlihatkan bahwa meskipun pendekatan pembangunan inklusif di setiap negara bisa berbeda, inti dari kebijakan tersebut adalah untuk memastikan setiap individu, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis, memiliki akses yang setara terhadap kesempatan yang tersedia. Ini mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam, yang semuanya saling berkaitan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak hanya adil, tetapi juga saling menghargai.

KESIMPULAN

Pembangunan inklusif bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, mendapatkan akses yang setara terhadap peluang dan manfaat pembangunan. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memperjuangkan keadilan sosial. Dalam masyarakat yang inklusif, pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas, sangat penting untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pembangunan inklusif juga berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tingkat keputusan pembangunan. Tidak hanya sebagai penerima manfaat, setiap

individu diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi juga mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Namun, penerapan pembangunan inklusif di masyarakat multikultural menghadapi tantangan besar. Diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau status sosial seringkali menghalangi kelompok-kelompok tertentu untuk mengakses peluang yang setara. Ketimpangan ekonomi juga memperburuk situasi, di mana kelompok marginal sering kali terpinggirkan dan kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.

Penting bagi pembangunan inklusif untuk mengakui dan menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat multikultural. Masyarakat dengan keragaman budaya, etnis, dan agama memiliki potensi besar untuk menciptakan kekayaan sosial dan inovasi, namun memerlukan kebijakan yang memfasilitasi penghargaan terhadap perbedaan serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar adil dan merata.

Secara keseluruhan, pembangunan inklusif dalam masyarakat multikultural bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Dengan mengutamakan kesetaraan dan keadilan sosial, pembangunan ini berupaya mewujudkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua kelompok, tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S. (2002). Dimensions of human development. *World development*, 30(2), 181-205.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Routledge.
- Banks, J. A., & Diem, N. (2008). Diversity and citizenship education. *Handbook of research in social studies education*, 137-154.
- Baumann, F. (2021). The next frontier—human development and the anthropocene: UNDP human development report 2020. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 63(3), 34-40.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Booth, A., Martyn-St James, M., Clowes, M., & Sutton, A. (2021). Systematic approaches to a successful literature review.
- Cerra, V. (2022). An inclusive growth framework. *How to achieve inclusive growth*, 1-31.
- Chaudhry, S. (2022). The assault on civil society: Explaining state crackdown on NGOs. *International Organization*, 76(3), 549-590.

- Cypher, J. M. (2014). *The process of economic development*. Routledge. Brighton: Institute of Development Studies.
- EDuCatIon, C. (2010). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age diversity. *Democracy and multicultural education*, 15.
- Fortier, A. M. (2021). The becoming citizen. In *Uncertain citizenship* (pp. 161-201). Manchester University Press.
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world* (Vol. 31). Columbia university press.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or recognition?: a political-philosophical exchange*. verso.
- Gasper, D. (2022). Rethinking human development and/as human security for the anthropocene: An analysis of the United Nations development programme trilogy of reports 2020–2022. *The International Journal of Social Quality*, 12(2), 1-24.
- Hardiansah, E. C. (2015). Pengantar edisi khusus 55 tahun pendidikan planologi: Pembangunan kota inklusif di era desentralisasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(1), 1-6.
- Hastuti, D. R., Pramana, R. P., & Sadaly, H. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas [Internet]. 2020. 61 p.*
- Hickey, S., & Du Toit, A. (2013). Adverse incorporation, social exclusion, and chronic poverty. In *Chronic poverty: Concepts, causes and policy* (pp. 134-159). London: Palgrave Macmillan UK.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1).
- Kabeer, N. (2010). *Can the MDGs provide a pathway to social justice?: The challenge of intersecting inequalities*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Kabeer, N. (Ed.). (2005). *Inclusive citizenship: Meanings and expressions* (Vol. 1). Zed Books.
- Khan, A. W. (2008). Media education, a crucial issue in the building of an inclusive knowledge society. *Empowerment through media education*, 15-18.
- Koentjaraningrat, K. (2009). Pengantar ilmu antropologi, edisi revisi PT. *Rineka Cipta: Jakarta*, 144.
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. *governance*, 2(1), 69-98.
- Kymlicka, W. (2007). Multicultural odysseys. *ethnopolitics*, 6(4), 585-597.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84.
- Modood, T. (2013). *Multiculturalism*. John Wiley & Sons.
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Pendidikan inklusif: membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung kesetaraan dan kearifan budaya. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(1), 11-22.
- Nasional, B. P. P. (2014). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Nasional, B. P. P. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *BAPENAS. Jakarta*.
- Negretto, G. L. (2021). Deepening democracy? Promises and challenges of Chile's road to a new

- constitution. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(2), 335-358.
- Nieto, S. (2010). Language, diversity, and learning: Lessons for education in the 21st century. Retrieved September, 30, 2012.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Parekh, B. (2001). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. *Ethnicities*, 1(1), 109-115.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sen, G. (2019). Gender equality and women's empowerment: Feminist mobilization for the SDG s. *Global Policy*, 10, 28-38.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. WW Norton & Company.
- Stuart, E., & Samman, E. (2017). Defining 'leave no one behind'. *ODI Briefing Note*. London: Overseas Development Institute.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2020). *Economic Development Economic Development*
- Triandafyllidou, A. (2013). *Tolerance, Pluralism and Social Cohesion: Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe*.
- Undp, A. (2016). *Africa human development report 2016 accelerating gender equality and women's empowerment in Africa* (No. 267638). United Nations Development Programme (UNDP).
- Union, I. P. United Nations Development Programme (UNDP)(2012). *Global parliamentary report: The changing nature of parliamentary representation*.
- Vandemoortele, J. (2002). Are the MDGs feasible?. *Targeting Development: Critical Perspectives on the Millennium Development Goals and International Development Targets*. London: Routledge.
- Watt, S. K. (2023). Multicultural initiatives as a practice of freedom. In *Designing Transformative Multicultural Initiatives* (pp. 11-22). Routledge.
- World Bank. (2025). *World Development Report: Social Inclusion*. Washington DC: WB.
- Ydo, Y. (2020). Inclusive education: Global priority, collective responsibility. *Prospects*, 49(3), 97-101.

PROFIL SINGKAT

Penulis pertama atas nama Umar Ramli, S.Sos., M.Si merupakan Dosen Sosiologi pada Universitas Muhammadiyah Sorong.